



SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 40 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 14
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak beserta perubahannya;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen Perjanjian Kerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang telah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Demak perlu adanya peningkatan kualitas, sehingga Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 perlu diubah untuk keempat kali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);

15. Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 14) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 14) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Demak:

- a. Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 61);
- b. Peraturan Bupati Demak Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 4);
- c. Peraturan Bupati Demak Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019 Nomor 47);

diubah, dengan daftar perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 21 Agustus 2021

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH

Diundangkan di Demak
pada tanggal 21 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2021 NOMOR 40



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 40 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan kerukunan antar/intra umat beragama	Kasus konflik antar umat beragama	Meningkatnya kerukunan antar/intra umat beragama	Kasus konflik antar umat beragama	Menunjukkan jumlah kasus konflik antar umat beragama yang terjadi pada tahun n di Kabupaten Demak \sum kasus konflik antar umat beragama yang terjadi pada tahun n	Kesbang polinmas
2	Mewujudkan reformasi birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	Meningkatnya kualitas manajemen dan kapasitas sumber daya aparatur	Indeks sistem merit	Menunjukkan tingkat penerapan sistem merit dlm manajemen ASN yg dilakukan oleh pemda mencakup 8 aspek yaitu : perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan, sistem informasi $((\text{nilai perencanaan kebutuhan} \times 10\%) + (\text{nilai pengadaan} \times 10\%) + (\text{nilai pengembangan karir} \times 30\%) + (\text{nilai promosi dan mutasi} \times 10\%) + (\text{nilai manajemen kinerja} \times 20\%) + (\text{nilai penggajian, penghargaan dan disiplin} \times 10\%) + (\text{nilai perlindungan dan pelayanan} \times 4\%) + (\text{nilai sistem informasi} \times 6\%)) \div 400$	BKPP
3			Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai SAKIP	Hasil audit Inspektorat Kabupaten/Propinsi/Kementerian PAN RB terhadap kinerja perangkat daerah/ pemerintah daerah dibandingkan tahun sebelumnya \sum nilai SAKIP tahun n	Setda

No	Tujuan	IndikatorTujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Penjelasan / FormulasiPerhitungan	PenanggungJawab
4			Meningkatnya nilai laporan kualitas pengelolaan keuangan daerah	Nilai opini BPK	Hasil audit BPK terhadap pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Demak $\sum \text{nilai opini BPK tahun } n$	BPKPAD
5			Meningkatnya pengawasan dan pengendalian internal daerah	Indeks perilaku anti korupsi	Merupakan nilai hasil survey yang dilakukan oleh instansi statistik terhadap kelompok masyarakat terkait pendapat dan pengalaman terkait dengan korupsi $\sum \text{nilai hasil survei eksternal indeks persepsi korupsi tahun } n$	Inpektorat
6			Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Nilai yang menggambarkan tingkat kematangan (maturity level) pelaksanaan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan penilaian dr KEMENPAN RB $\sum \text{indeks Sistem Pemerintahan Berbasis elektronik (SPBE) tahun } n$	Dinkominfo
				Rata – rata Indeks Kepuasan Masyarakat	Menunjuk pada nilai rata-rata jumlah nilai survey kepuasan masyarakat pada seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Demak dibandingkan dengan jumlah Perangkat Daerah Pemkab Demak $\frac{\sum \text{nilai SKM perangkat daerah}}{\sum \text{perangkat daerah}}$	Setda
7	Meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan	Persentase pertumbuhan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan dalam PDRB	Meningkatnya produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan dan peternakan	Persentase Pertumbuhan sub sektor pertanian, perkebunan dan peternakan	Menunjuk pada rata-rata jumlah persentase pertumbuhan sub sektor pertanian, sub sektor perkebunan, dan sub sektor peternakan di Kabupaten Demak pada tahun n $\frac{\% \text{ sub sektor pertanian tahun } n - (n - 1) + \% \text{ sub sektor perkebunan tahun } n - (n - 1) + \text{sub sektor peternakan tahun } n - (n - 1)}{3}$	Dinpertan Pangan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
8	menuju kedaulatan pangan		Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan	Persentase pertumbuhan sub sektor perikanan kelautan	Menunjuk pada jumlah rata-rata persentase pertumbuhan perikanan budidaya dan persentase pertumbuhan perikanan tangkap dan kelautan $\frac{(\sum \% \text{pertumbuhan perikanan budidaya}) + (\sum \% \text{pertumbuhan perikanan tangkap dan kelautan})}{2}$	Dinlutkan
9			Meningkatnya ketersediaan, distribusi, keanekaragaman dan keamanan pangan	Skor PPH (Pola Pangan Harapan)	Skor PPH menunjukkan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Demak skor PPH = skor PPH padi-padian+skor PPH umbi-umbian+skor PPH pangan hewani+skor PPH minyak dan lemak+skor PPH buah/biji berlemak+skor PPH kacang-kacangan+skor PPH gula+skor PPH sayur & buah	Dinpertan Pangan
				Ketersediaan pangan utama	Menunjuk pada jumlah produksi pangan utama (beras) di Kabupaten Demak pada 1 tahun n $\sum \text{produksi pangan utama pada tahun } n$	
10	Meningkatkan kinerja perindustrian dan perdagangan serta kapasitas koperasi dan UMKM	Pertumbuhan ekonomi dari sektor perindustrian, perdagangan dan koperasi UMKM	Meningkatnya perkembangan industri kecil dan menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil dan menengah	Menunjuk pada persentase selisih jumlah industri kecil dan menengah pada tahun n dan tahun sebelumnya dibandingkan dengan jumlah industri kecil dan menengah pada tahun sebelumnya $\frac{\sum \text{industri kecil dan menengah tahun } n - \sum \text{industri kecil dan menengah tahun } n - 1}{\sum \text{industri kecil dan menengah tahun } n - 1} \times 100\%$	Dinnakerind
11			Meningkatnya perkembangan sektor perdagangan, koperasi dan UKM	Persentase perkembangan sektor perdagangan, koperasi dan UKM	Menunjuk pada persentase selisih antara nilai sektor perdagangan, koperasi UMKM pada tahun n dengan tahun sebelumnya dibandingkan nilai pada tahun sebelumnya di Kabupaten Demak $\frac{\text{nilai sektor perdagangan, koperasi UMKM tahun } n - \text{tahun } n - 1}{\text{nilai sektor perdagangan, koperasi UMKM tahun } n - 1} \times 100\%$	Dindagkop UKM

No	Tujuan	IndikatorTujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Penjelasan / FormulasiPerhitungan	PenanggungJawab
12	Menurunnya angka pengangguran	TPT (tingkat pengangguran terbuka)	Meningkatnya kompetensi dan daya saing tenaga kerja	Persentase angkatan kerja yang bekerja	Menunjuk pada persentase perbandingan antara angkatan kerja yang bekerja dengan jumlah angkatan kerja di kabupaten Demak $\frac{\sum \text{angkatan kerja yang bekerja}}{\sum \text{angkatan kerja}} \times 100\%$	Dinnakerind
13	Meningkatkan daya saing pariwisata dan pelestarian kebudayaan	Kontribusi pendapatan sektor pariwisata terhadap PAD	Meningkatnya kontribusi pendapatan pariwisata dalam PAD	Persentase peningkatan kontribusi pendapatan pariwisata	Menunjuk pada persentase selisih nilai pendapatan dari sektor pariwisata pada tahun n dengan tahun sebelumnya dibandingkan dengan nilai pendapatan sektor pariwisata pada tahun sebelumnya $\frac{\text{nilai pendapatan sektor pariwisata tahun } n - \text{tahun } n - 1}{\text{nilai pendapatan sektor pariwisata tahun } n - 1} \times 100\%$	Dinparta
14			Meningkatnya pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	Persentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	Menunjuk pada persentase jumlah benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dibandingkan dengan jumlah target pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya di Kabupaten Demak $\frac{\sum \text{benda, situs, dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\sum \text{target benda, situs, dan kawasan cagar budaya}} 100\%$	Dindikbud
15	Meningkatkan infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan	Persentase Pelayanan Infrastruktur Daerah	Meningkatnya kualitas kondisi jalan dan jembatan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Menunjuk pada persentase perbandingan antara jumlah panjang jalan dan jembatan yang berada dalam kondisi baik dengan jumlah panjang seluruh jalan dan jembatan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Demak $\frac{\sum \text{panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik}}{\sum \text{panjang seluruh jalan dan jembatan yang ada}} \times 100\%$	Dinputaru
16			Terpeliharanya jaringan irigasi yang berkelanjutan	Persentase luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Menunjuk pada persentase perbandingan antara jumlah luas irigasi yang berada dalam kondisi baik dengan jumlah luas seluruh irigasi di Kabupaten Demak $\frac{\sum \text{luas irigasi dalam kondisi baik}}{\sum \text{luas irigasi kabupaten}} \times 100\%$	Dinputaru

No	Tujuan	IndikatorTujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Penjelasan / FormulasiPerhitungan	PenanggungJawab
17			Terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan	Persentase rata-rata sarana dan prasarana permukiman yang layak	<p>menunjuk pada persentase perbandingan jumlah sarana dan prasarana permukiman yang layak dengan luas kawasan permukiman yang menjadi target penanganan di Kabupaten Demak</p> $\frac{\Sigma \text{sarana dan prasarana permukiman yang layak}}{\Sigma \text{luas kawasan permukiman yang menjadi target penanganan}} \times 100\%$	Dinperkim
18			Meningkatnya pengendalian pemanfaatan ruang	Persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan perkotaan	<p>Menunjuk pada persentase perbandingan antara jumlah luas RTH publik yang ada dengan luas wilayah Kabupaten Demak</p> $\frac{\text{luas RTH publik}}{20\% \times \text{luas wilayah kawasan perkotaan}} \times 100\%$	Dinputaru
19			Meningkatnya Pelayanan perhubungan darat	Persentase layanan perhubungan darat dalam kondisi baik	<p>Menunjuk pada jumlah persentase layanan transportasi dan perhubungan darat yang berada dalam kondisi baik dibandingkan dengan target layanan transportasi dan perhubungan darat di Kabupaten Demak</p> $\frac{\Sigma \% \text{layanan transportasi dan perhubungan darat dalam kondisi baik}}{\Sigma \text{target pelayanan}} \times 100\%$	Dinhub

No	Tujuan	IndikatorTujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Penjelasan / FormulasiPerhitungan	PenanggungJawab
20	Meningkatkan ketersediaan, kualitas, kesetaraan, keterjangkauan dan kepastian dalam memperoleh pelayanan pendidikan dan kualitas derajat kesehatan masyarakat	IPM	Meningkatnya partisipasi pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, PAUD dan pendidikan non formal	Rata-rata lama sekolah (RLS)	<p>Menunjuk pada jumlah tahun yang merupakan kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan.</p> $RLS = \frac{1}{n} \times \sum_{i=1}^n x_i$ <p>dimana :</p> <p>RLS = Rata-rata lama sekolah penduduk usia 25 tahun ke atas</p> <p>x_i = Lama sekolah penduduk ke-i yang berusia 25 tahun</p> <p>N = Jumlah penduduk usia 25 tahun ke atas</p>	Dindikbud
Harapan lama sekolah (HLS)	<p>Menunjuk pada jumlah tahun yang merupakan lama sekolah yang diharapkan dialami oleh anak kelompok umur tertentu di masa yang akan datang</p> <p>Formula → $HLS_a^t = \sum_{i=a}^n \frac{E_i^t}{P_i^t}$</p> <p>Keterangan:</p> <p>HLS_a^t Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t</p> <p>E_i^t Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t</p> <p>P_i^t Jumlah penduduk usia i pada tahun t</p> <p>i Usia ($a, a + 1, \dots, n$)</p>					
21			Meningkatnya jumlah kunjungan perpustakaan	Pertumbuhan kunjungan perpustakaan	<p>Menunjuk pada Jumlah pengunjung perpustakaan pada tahun tersebut dikurangi jumlah pengunjung pada tahun sebelumnya dibagi jumlah pengunjung pada tahun sebelumnya dikali seratus persen di Kabupaten Demak</p> $\frac{\sum \text{pengunjung perpustakaan tahun } n - \sum \text{pengunjung perpustakaan tahun } n-1}{\sum \text{pengunjung perpustakaan tahun } n-1} \times 100\%$	Dinperpusar

22			Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan	Usia Harapan Hidup	Menunjuk pada angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Dinkes
23	Meningkatkan Jaminan dan perlindungan Sosial dan Penurunan Angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	Meningkatnya Penanganan PMKS dan penanggulangan kemiskinan secara terpadu	Persentase PMKS yang tertangani	<p>Menunjuk pada persentase jumlah PMKS yang ditangani dibandingkan dengan target jumlah PMKS yang seharusnya ditangani dalam satu tahun di Kabupaten Demak</p> $\frac{\sum PMKS \text{ yang ditangani}}{\sum PMKS \text{ yang ditargetkan}} \times 100 \%$	Dinsos P2PA

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
24	Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Angka kriminilitas yang ditangani	Menurunnya angka kriminalitas	Persentase Penanganan Kasus Konflik dimasyarakat	Menunjuk pada persentase jumlah kasus konflik di masyarakat yang mendapatkan penanganan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dibandingkan dengan jumlah kasus konflik yang teridentifikasi terjadi di masyarakat $\frac{\Sigma \text{konflik di masyarakat yang ditangani}}{\Sigma \text{konflik di masyarakat yang teridentifikasi}} \times 100\%$	Kesbangpolinmas
				Persentase Penegakan Peraturan Daerah	Menunjuk pada jumlah penegakan terhadap pelanggaran perda dan atau perkara dalam satu tahun dibandingkan dengan jumlah pelanggaran perda dan atau perkara yang terjadi dalam tahun bersangkutan di Kabupaten Demak $\frac{\Sigma \text{pelanggaran perda dan atau perkara yang diselesaikan pada tahun } n}{\Sigma \text{pelanggaran yang dilaorkandan atau dipantaudi tahun } n} \times 100\%$	Satpol PP
25			Meningkatnya kesadaran Masyarakat dalam penanganan bencana	Persentase desa tangguh bencana	Menunjuk pada persentase jumlah desa tangguh bencana yang dibentuk dibandingkan dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Demak $\frac{\Sigma \text{desa tangguh bencana}}{\Sigma \text{desa}} \times 100\%$	BPBD
26	Mengembangkan potensi pemuda dalam olahraga dan pembangunan.	Persentase peningkatan kapasitas pemuda dan olahraga	Meningkatnya kapasitas pemuda	Persentase peningkatan kapasitas pemuda	Menunjuk pada persentase selisih jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun tersebut dan jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun sebelumnya dibandingkan dengan jumlah pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya pada tahun sebelumnya $\frac{\Sigma \text{pemuda yang ditingkatkan kapsitasnya tahun } n - \text{tahun } n - 1}{\Sigma \text{pemuda yang ditingkatkan kapasitasnya tahun } n - 1} \times 100\%$	Dinpora
27			Meningkatnya prestasi olahraga	Persentase peningkatan prestasi olahraga	Menunjuk pada persentase perbandingan perolehan medali olahraga pada tahun n dengan tahun sebelumnya $\frac{\Sigma \text{medali olahraga yang diperoleh pada tahun } n - \text{tahun } n - 1}{\Sigma \text{medali olahraga uang diperoleh pada tahun } n - 1} \times 100\%$	Dinpora

28	Mengembangkan potensi kesenian lokal	Persentase peningkatan potensi kesenian lokal	Meningkatnya pelestarian Kesenian lokal	Persentase peningkatan pertunjukan kesenian local	Menunjukkan persentase perbandingan antara jumlah pertunjukan kesenian yang digelar pada tahun n dengan tahun sebelumnya $\frac{\sum \text{pertunjukan kesenian pada tahun } n - \text{tahun } n - 1}{\sum \text{pertunjukan kesenian pada tahun } n - 1} \times 100\%$	Dinparta
29	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Persentase pertumbuhan penduduk	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Total Fertelity Rate (TFR)	Menunjuk pada jumlah angka kelahiran menurut kelompok umur selama satu tahun pada tahun n per 1000 di Kabupaten Demak $TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$ $ASFR_i = \frac{b_i}{p_{if}} \times K$ <p>TFR = Angka Kelahiran Total ASFR = Angka Kelahiran Menurut Kelompok Umur</p> <p>b_i = Jumlah kelahiran dari perempuan pada kelompok umur i pada tahun tertentu p_i = Jumlah penduduk perempuan kelompok umur i pada pertengahan tahun yang sama i = kelompok umur (i=1 untuk kelompok umur 15-19, i=2 untuk kelompok umur 20-24,....., i=7 untuk kelompok umur 45-49 K = bilangan kontanta biasanya 1000</p>	Dinpermasdes P2KB
30	Meningkatkan keberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya partisipasi dan keswadayaan masyarakat dalam pembangunan	Persentase partisipasi masyarakat dalam pembangunan	Menunjuk pada persentase jumlah pelaksanaan kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat dibandingkan dengan jumlah kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat secara keseluruhan selama setahun pada tahun n di Kabupaten Demak $\frac{\sum \text{kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat yang terlaksana}}{\sum \text{kegiatan yang melibatkan unsur masyarakat dalam pembangunan pemberdayaan masyarakat}} \times 100\%$	Dinpermasdes P2KB

				<p>Persentase keswadayaan masyarakat dalam pembangunan</p>	<p>Menunjuk pada persentase jumlah swadaya masyarakat yang mendukung program pembangunan pemberdayaan masyarakat terhadap total program pembangunan pemberdayaan masyarakat pada tahun tersebut</p> $\frac{\sum \text{swadaya masyarakat yang mendukung program pembangunan pemberdayaan masyarakat tahun } n}{\sum \text{program pembangunan pemberdayaan masyarakat tahun } n} \times 100\%$	
31			<p>Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak</p>	<p>Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)</p>	<p>Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Dalam penghitungan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) ada tiga komponen penyusun IDG, yaitu : keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan.</p>	<p>Dinsos P2PA</p>

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
				Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	Menunjuk pada jumlah kasus kekerasan terhadap anak pada tahun tersebut $\sum \text{kasus kekerasan terhadap anak tahun } n$	
32	Meningkatkan nilai dan jumlah investasi serta kualitas pelayanan publik Kabupaten Demak	Nilai Realisasi Investasi	Pertumbuhan Investasi	Nilai investasi PMA (US\$)	Menunjuk pada jumlah total nilai investasi dari luar negeri yang masuk ke Kabupaten Demak selama satu tahun pada tahun n $\sum \text{nilai investasi PMA dalam tahun } n$	Din PMPTSP
				Nilai investasi PMDN (Juta)	Menunjuk pada jumlah total nilai investasi dari dalam negeri yang masuk ke Kabupaten Demak selama satu tahun pada tahun n $\sum \text{nilai investasi PMDN dalam tahun } n$	

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Penanggung Jawab
33	Mencegah penurunan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas hidup	Indeks kualitas air	$\text{Nilai relatif} = \frac{C_i}{L_{ij}}$ <p>Rumus metode IP:</p> $IP = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})_{\text{Rata-rata}}^2 + (C_i/L_{ij})_{\text{Maksimum}}^2}{2}}$ <p> $0 \leq PI_j \leq 1,0 \rightarrow$ baik (memenuhi baku mutu) $1,0 < PI_j \leq 5,0 \rightarrow$ cemar ringan $5,0 < PI_j \leq 10,0 \rightarrow$ cemar sedang $PI_j > 10,0 \rightarrow$ cemar berat </p>	Dinas Lingkungan Hidup
				Indeks pencemaran udara	$IKU = 100 - [50/0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$	
				Indeks tutupan lahan	$IKTL = 100 - ((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3})$ <p>dimana: IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan TH = Tutupan Hutan</p>	

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK,

KENDARSIHURIANI, SH MH
Pembina Tingkat I
NIP.197007081995032003

BUPATI DEMAK,

TTD

EISTI'ANAH